

Judul : Pemerintah bentuk BPGMN, DPR: Karhutla bisa cepat terkendali  
Tanggal : Senin, 28 September 2026  
Surat Kabar : Rakyat Merdeka  
Halaman : 10

## Pemerintah Bentuk BPGMN DPR: Karhutla Bisa Cepat Terkendali

SENAYAN menyambut baik keputusan Presiden membentuk badan khusus untuk mengelola ekosistem gambut dan mangrove yaitu Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Tujuannya untuk memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan mengatakan, langkah ini sejalan dengan rekomendasi yang sering disampaikan Komisi Kehutanan DPR dalam berbagai rapat kerja bersama Menteri Kehutanan (Menhut) sebelumnya. Keberadaan lembaga khusus seperti Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dinilai krusial dalam mencegah karhutla di wilayah gambut.

Sebagai pengingat, Badan Restorasi Gambut (BRG) yang kemudian bertransformasi menjadi BRGM awalnya dibentuk sebagai respons cepat atas peristiwa karhutla berskala luas pada tahun 2015. "Terbukti, kehadiran lembaga khusus tersebut berhasil menekan angka karhutla secara signifikan," ujar Yohan di Jakarta, Minggu (27/9/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Keputusan strategis ini diambil dalam diskusi penanganan karhutla bersama akademisi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Yohan melanjutkan, badan baru ini perlu diberikan kewenangan luas dan dukungan anggaran memadai agar efektif dalam mengelola ekosistem gambut dan mangrove secara komprehensif. Juga mesti berkolaborasi erat dengan kementerian/lembaga terkait serta Pemerintah Daerah (Pemda).

Menurutnya, tata kelola ekosistem di tingkat tapak telah diatur oleh undang-undang sektoral. Seperti pengelolaan gambut dalam kawasan hutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan ekosistem mangrove melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. "Koordinasi yang kuat menjadi kunci utama," tandas politisi PAN ini.

Selain itu, ia meminta Pemerintah segera berkomunikasi dan berkoordinasi dengan DPR terkait rencana alokasi anggaran yang terpisah dari Kemenhut. Langkah ini mendesak mengingat siklus pengesahan anggaran tahun 2027 akan segera memasuki tahap krusial pada pekan depan.

Anggota Komisi IV DPR Usman Husin menambahkan, pembentukan BPGMN penting untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut yang kerap terjadi setiap tahun. Penguatan pengelolaan gambut perlu menjadi perhatian serius Pemerintah. Pasalnya, kebakaran lahan gambut tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat akibat asap yang ditimbulkan. "Langkah Presiden sudah tepat karena dampak kebakaran dan asap sangat mengganggu kesehatan manusia," ujar Usman di Jakarta, Minggu (27/9/2026).

Selain itu, Usman mendesak adanya perlindungan terhadap ekosistem mangrove. Alasannya, mangrove memiliki fungsi strategis dalam menjaga kawasan pesisir, terutama untuk mencegah abrasi. Karena itu, pengelolaan mangrove perlu diperkuat dan penebaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dicegah.

Usman berharap, Pemerintah dapat lebih fokus dalam menangani pengelolaan gambut dan mangrove secara terpadu. "Langkah tersebut penting untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak bencana ekologis," kata politisi PKB ini.

Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan pembentukan BPGMN tidak akan tumpang tindih dengan tugas Kemenhut. Lembaga baru ini diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan karhutla, terutama di kawasan gambut. ■ TIF